



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SUHARTO
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL
3. NHK : 145489

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.815.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. Tanah Seluas 846 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 79.500.000
3. Tanah Seluas 3090 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m²/76 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 212 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Bangunan Seluas 21 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
8. Tanah Seluas 141 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 172.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.475.164.333
F. HARTA LAINNYA	Rp.	147.094.535
Sub Total	Rp.	3.658.258.868
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.658.258.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.